

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Hambatan Non-Tarif diawali sejak bulan Juli 2006 dan berlaku untuk semua negara pengekspor kopi ke Jepang. Kebijakan ini berdampak negatif terhadap ekspor kopi Indonesia ke Jepang karena banyak petani dan eksportir kopi Indonesia yang belum mampu memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Jepang. Selama tahun 2000-2021 Jepang merupakan negara importir utama kopi Indonesia. Namun, dikarenakan ketatnya kebijakan hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh Jepang, Indonesia juga perlu untuk mencari pasar baru untuk memasarkan hasil produksi kopinya. Peningkatan mutu kopi merupakan cara yang paling ideal agar ekspor kopi Indonesia dapat dengan mudah bersaing dengan negara-negara eksportir utama lainnya. Namun usaha ini adalah usaha untuk medium dan long term, memerlukan waktu yang sangat panjang

2. Indonesia memiliki daya saing yang kuat untuk komoditi kopi di Jepang dengan rata-rata nilai RCA dari tahun 2000-2021 sebesar 4,87, meskipun masih dibawah negara Kolombia, Brazil, dan Vietnam. Rata-rata nilai RCA kopi Indonesia ketika periode I, yaitu ketika belum ada pelanggaran hambatan non-tarif oleh Indonesia adalah 4,94 dimana rata-rata RCA tersebut bernilai lebih besar daripada ketika periode II yaitu ketika setelah terjadinya pelanggaran hambatan non-tarif oleh Indonesia yang hanya bernilai 4,79. Artinya hambatan non-tarif mempengaruhi daya saing ekspor kopi Indonesia ke Jepang.

3. Posisi daya saing negara Indonesia berada pada posisi daya saing *retreat* dengan rata-rata pertumbuhan pangsa pasar kopi Indonesia di Jepang sebesar -0,002995 serta rata-rata pertumbuhan pangsa produk kopi dunia di Jepang sebesar -0,037217. Hasil ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan pangsa pasar kopi Indonesia di negara Jepang dan diikuti dengan penurunan permintaan terhadap kopi Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa kopi Indonesia tidak lagi diminati di pasar Jepang. Serta ekspor kopi Indonesia memiliki potensi pengembangan pasar yang kurang potensial yang mengindikasikan terjadinya penurunan kinerja ekspor kopi Indonesia ke Jepang.

B. Saran

1. Peningkatan mutu kopi merupakan cara yang paling ideal agar ekspor kopi Indonesia dapat dengan mudah bersaing dengan negara-negara eksportir utama lainnya. Namun usaha ini adalah usaha yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Hal ini dikarenakan, kopi Indonesia diproduksi sebagian besar oleh perkebunan rakyat, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengawasinya. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah menghimbau petani untuk berkelompok dan membangun koperasi. Sehingga, pemeliharaan dan perawatan tanaman kopi menjadi lebih mudah, meningkatkan pendapatan petani, dan permodalan petani menjadi terjamin.
2. Pemerintah harus terus mendorong petani agar dapat memenuhi standar budidaya tanaman kopi mulai dari persiapan lahan, tanam, pemeliharaan hingga panen agar dapat meningkatkan mutu kopi yang dihasilkan. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan program penyuluhan tentang budidaya kopi yang baik. Serta, para pelaku usaha seperti eksportir kopi di Indonesia perlu memperhatikan kebijakan yang diterapkan oleh Jepang dalam penetapan kebijakan hambatan non-tarif agar kopi Indonesia bisa bersaing dan menguasai pasar internasional.
3. Potensi pengembangan pasar kopi Indonesia ke Jepang adalah kurang potensial. Sehingga, Indonesia harus bisa mencari peluang untuk mendapatkan pangsa pasar baru di Asia selain Jepang, seperti Malaysia, Korea Selatan, Cina, dll yang pertumbuhan konsumsinya terus meningkat dengan signifikan beberapa tahun terakhir.